

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023



**Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi,
Delta Mas. Sukamahi. Cikarang Pusat.
Kabupaten Bekasi. Jawa Barat**



Bismillahirrahmaannirrohim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran kepada Allah Subhanahu Wata'ala, senantiasa kami panjatkan karena atas perkenan dan Karunia Nya kami dapat Menyusun rangkaian kinerja Pengadilan Negeri Cikarang dalam kurun waktu 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dalam **LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2023.**

Dalam laporan tahun 2023 ini berisi tentang keadaan kantor terkini, kegiatan pelaksanaan tugas di kepaniteraan Pidana, kepaniteraan Perdata termasuk pelaporan keadaan perkara yang masuk dan yang telah diputus serta upaya hukum, pelaksanaan tugas di kepaniteraan Hukum, bagian keuangan, bagian kepegawaian dan bagian umum termasuk pelaksanaan inventaris BMN serta yang sangat signifikan adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik.

Dalam Laporan ini kami angkat kekurangan, hambatan dan Rekomendasi dalam pelaksanaan kerja, namun demikian kekurangan dan hambatan tidak mengurangi atau menghambat target dan capaian kinerja yang direncanakan untuk tahun 2023, Rekomendasi diperlukan dalam rangka mencapai hasil kerja maksimal di tahun mendatang dengan demikian melalui laporan tahun 2023 ini diharapkan pelaksanaan tugas dan kerja Pengadilan Negeri Cikarang yang sudah menjadi acuan untuk kinerja di tahun mendatang guna memaksimalkan capaian kinerja yang mendukung Visi Misi Mahkamah Agung dan di implementasikan pada Pengadilan Negeri Cikarang.

Akhirnya kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kerja sama dari para Hakim, Panitera, Sekretaris dan Pejabat Struktural yang tergabung dalam Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2023 ini.

Selanjutnya kami sampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dengan harapan Laporan Kegiatan Pengadilan Negeri Cikarang ini dapat memenuhi ketentuan yang diharapkan.

Terima kasih.

CIKARANG, 29 Desember 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG



KEMENTERIAN AGUSTIAN, S.H., M.Hum.
NIP. 19750801 200502 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II A. Keadaan Perkara.....	10
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	10
1.1. Perkara Perdata Permohonan	10
1.2. Perkara Perdata Gugatan.....	10
1.3. Perkara Pidana Biasa dan Khusus.....	11
1.4. Perkara Pidana Anak.....	11
1.5. Perkara Pidana Pra Peradilan	12
1.6. Perkara Pidana Pidana Cepat	12
1.7. Perkara Pidana Lalu - Lintas.....	13
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	13
2.1. Perkara Pidana Banding.....	13
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	14
3.1. Perkara Pidana Kasasi.....	14
4. Keadaan Perkara Pidana Peninjauan Kembali	14
4.1. Perkara Pidana Peninjauan Kembali	14
5. Keadaan Perkara Pidana Grasi	15
4.1. Perkara Pidana Grasi.....	15
B. Penyelesaian Perkara.....	15
1. Jumlah Perkara Yang Putus.....	15
2. Jumlah Perkara Yang Putus Tepat Waktu.....	16
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.....	16
4. Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi.....	16
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	17
C. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	17
a). Posbakum	18
b). Sidang Keliling	18
c). Perkara Prodeo	18

BAB III Sumber Daya Manusia.....	19
a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	20
b. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	20
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial.....	20
2. Sumber Daya Manusia NonTeknis Yudisial.....	20
3. Mutasi.....	21
a. Mutasi Masuk.....	21
b. Mutasi Keluar.....	22
4. Promosi.....	22
5. Pensiun	23
6. Diklat.....	23
7. Pengisian Jabatan Struktural	25
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana, Prasarana Dan Teknologi Informasi	28
A. Pengelola Keuangan	28
a). Pengelolaan Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi	28
b). Pengelola Anggaran DIPA Badan Peradilan Umum.....	29
c). Pendapatan Negara Bukan Pajak	29
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	31
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	40
1. Implementasi e-court	40
2. Implementasi SIPP.....	40
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik.....	45
A. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	45
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	45
C. Inovasi Pelayanan Publik.....	46
BAB VI Pengawasan	55
A. Internal.....	55
B. Evaluasi.....	57
BAB VII Penutup.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Rekomendasi.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Cikarang merupakan salah satu dari 85 Pengadilan baru yang diresmikan operasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 22 Oktober 2020 di Melonguane, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Setelah pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 26 Oktober 2020 yang diikuti pelantikan Wakil Ketua dan seluruh pejabat struktural dan fungsional baik kesekretariatan maupun kepaniteraan maka sejak saat itu Pengadilan Negeri Cikarang mulai melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri Cikarang dibawah Mahkamah Agung melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan wilayah hukum Kabupaten Bekasi. Dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat mencari keadilan di Kabupaten Bekasi, Pengadilan Negeri Cikarang mendasarkan pada hal-hal sebagaimana dibawah ini.

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Negeri Cikarang adalah peradilan tingkat pertama yang mempunyai wilayah hukum meliputi Kabupaten Cikarang. Dalam perkembangannya pada tahun 2004 Pengadilan Negeri telah resmi menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung RI, diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung RI dituntut agar lebih independen hal tersebut tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yaitu Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.

Pada era reformasi lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional dibidang hukum, begitu pula dengan Laporan Keuangan Mahkamah Agung menargetkan untuk mendapatkan opini dari BPK yaitu “WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)”. Dengan perbaikan-perbaikan di segala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI diharapkan lembaga peradilan dimata masyarakat umum tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, akan tetapi menjadikan pengayom masyarakat dalam mencari keadilan.

Dasar dari pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 pada kantor Pengadilan Negeri Cikarang yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII//2007 tentang pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan), Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4108/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

Tujuan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan juga sebagai barometer untuk peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 berisi tentang capaian kegiatan-kegiatan di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Pengadilan Negeri bertugas menerima, memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan. Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan usaha untuk mewujudkan sebuah Badan Peadilan yang Agung dengan:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan

Agenda Pembaruannya, maka di Pengadilan Negeri Cikarang ada program prioritas, antara lain adalah:

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan, maka pada Pengadilan Negeri Cikarang juga telah membuat program website Pengadilan Negeri Cikarang dengan alamat : <http://pn-cikarang.go.id>, program telah berjalan dengan update setiap saat. dan juga pelayanan system informasi penulisan perkara (SIPP) melalui sipp.pn-cikarang.go.id/

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan.

Pada program ini Pengadilan Negeri Cikarang telah menyediakan meja informasi. Selain itu terdapat meja pengaduan yang berada di bawah tanggung jawab Panitera Muda Hukum yang telah memperoleh pelatihan singkat dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

3. Program Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI Dengan telah diterbitkannya Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035,

Pengadilan Negeri Cikarang berusaha mengadakan perbaikan dan perubahan seperti apa yang tertuang dalam Cetak Biru tersebut.

B. VISI DAN MISI

V I S I

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI CIKARANG YANG AGUNG “

M I S I

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Cikarang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Cikarang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Cikarang.

Memperbaiki aksesoris pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat ;

Dengan Motto Pelayanan “ **BISA** ” (Berintegritas, Inovatif, Semangat, Akuntabel)

C. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Cikarang bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja peradilan dengan upaya :
 - Meningkatkan profesionalisme aparat peradilan dengan peningkatan pendidikan dan keahlian.
 - Meningkatkan disiplin dan moralitas aparat peradilan dengan menegak peraturan disiplin kepegawaian dan kode etik (*Court of Conduct*) bagi pejabat peradilan
 - Memantapkan penerapan administrasi keperkaraan dan administrasi kesekretariatan berbasis IT (*Information Technology*)
2. Meningkatkan transparansi manajemen peradilan supaya mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022, khususnya mengenai :
 - Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (Pedoman Pelayanan Informasi) merupakan petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat di seluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan.
 - Informasi mengenai putusan atau penetapan Pengadilan yang dikeluarkan Pengadilan berdasarkan Pedoman ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti atau dasar melakukan suatu upaya hukum
3. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan, khususnya sarana Gedung Kantor Pengadilan Negeri Cikarang yang sesuai dengan standar Gedung peradilan kelas II di Indonesia.

Selain itu, Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Cikarang juga bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut :

- Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan aparatur yang netral, bersih dan berwibawa.
- Meningkatkan kualitas hubungan kerjasama antar instansi terkait.
- Menjamin tersedianya sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi.
- Meningkatkan disiplin aparatur peradilan.

4 Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel, selain itu peningkatan kinerja juga bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

5 Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, guna mengatur hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

D. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Cikarang

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Cikarang dengan Motto “Pelayanan Prima dan Putusan Berkualitas” dengan kebijakan mutu :

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas.
2. Memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu.
4. Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Negeri Cikarang.

5. Meningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan.
6. Menyediakan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi yang memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan.
7. Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat.
8. Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu dan pelaksanaannya.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Cikarang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
7. Peningkatan Kualitas SDM

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI CIKARANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
		f. Index responden Pencari Keadilan terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase penyelesaian Minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan
		b. Persentase salinan putusan yang diterima oleh Pengadilan pengaju tepat waktu
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan hokum (posbakum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

6 (Enam) sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Cikarang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksestabilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Cikarang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.
3. Penyelesaian upaya hukum perkara Pidana dan Perdata disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dari Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dari Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Tersajinya satuan kerja yang mendapatkan pembinaan teknis pengelolaan keuangan ;
- b. Terselenggaranya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- c. Pedoman pengelolaan keuangan Negara ;
- d. Laporan kegiatan biro keuangan ;
- e. Terselenggaranya operasional perkantoran dan non operasional satker daerah ;
- f. Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
- g. Pedoman Pengadaan Sarana dan Prasarana ;
- h. Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana dengan baik;

- i. Penyelesaian administrasi Berkas Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu ;
- j. Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum ;
- k. Pelaksanaan *zitting plaats* (tempat sidang tetap) dan pelaksanaan Pembebasan Perkara Prodeo ;
- l. Jumlah standart pelaksana tata kerja dan tata kelola Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum yang disusun ;
- m. Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum ;
- n. Ketersediaan data dan dokumen statistik perkara dilingkungan Peradilan Umum yang akurat.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Cikarang diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Cikarang harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan Pengadilan Negeri Cikarang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 (lima) tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Cikarang dapat terwujud dengan baik.

BAB II

A. Keadaan Perkara

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

1.1. Perkara Perdata Permohonan

Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara perdata permohonan tahun 2023 :

**KEADAAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2023
PER 31 DESEMBER 2023**

No	Bulan	Sisa Tahun 2022	Masuk	Cabut	Putus	Sisa Akhir
1	Januari	27	25	1	39	12
2	Februari		31	0	24	19
3	Maret		28	0	30	17
4	April		13	0	18	12
5	Mei		43	0	31	24
6	Juni		39	0	32	31
7	Juli		45	0	48	28
8	Agustus		53	0	58	23
9	September		49	1	42	29
10	Oktober		36	0	39	26
11	November		41	0	40	27
12	Desember		34	0	34	27
Jumlah		27	437	2	435	27

1.2. Perkara Perdata Gugatan

Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara perdata Gugatan tahun 2023 :

**KEADAAN PERKARA PERDATA GUGATAN
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2023
PER 31 DESEMBER 2023**

No	Bulan	Sisa Tahun 2022	Masuk	Cabut	Putus	Sisa Akhir
1	Januari	127	25	2	18	132
2	Februari		32	1	26	137
3	Maret		46	1	28	154
4	April		12	1	32	133
5	Mei		43	2	33	141
6	Juni		28	1	28	140
7	Juli		31	0	30	141
8	Agustus		33	1	30	143
9	September		22	2	39	124
10	Oktober		26	0	29	121
11	November		28	1	36	112
12	Desember		28	0	22	118
Jumlah		127	354	12	351	118

1.3. Perkara Pidana Biasa dan Pidana Singkat

Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara Pidana Biasa dan Pidana Singkat tahun 2023 :

**KEADAAN PERKARA PIDANA BIASA DAN PIDANA SINGKAT
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2023
PER 31 DESEMBER 2023**

No	Bulan	Sisa Tahun 2022	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1	Januari	104	42	45	101
2	Februari		43	50	94
3	Maret		55	52	97
4	April		50	26	121
5	Mei		51	45	127
6	Juni		40	59	108
7	Juli		35	42	101
8	Agustus		42	53	90
9	September		35	47	78
10	Oktober		60	35	103
11	November		65	50	118
12	Desember		46	42	122
Jumlah		104	564	564	122

1.4. Perkara Pidana Anak

Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara Pidana Anak tahun 2023 :

**KEADAAN PERKARA PIDANA ANAK
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2023
PER 31 DESEMBER 2023**

No	Bulan	Sisa Tahun 2022	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1	Januari	1	5	3	3
2	Februari		2	3	2
3	Maret		5	4	3
4	April		0	3	0
5	Mei		1	0	1
6	Juni		3	2	2
7	Juli		4	4	2
8	Agustus		11	10	2
9	September		0	3	0
10	Oktober		1	1	0
11	November		4	0	4
12	Desember		1	4	1
Jumlah		1	37	37	1

1.5. Perkara Pidana Pra Peradilan

Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara Pidana Pra Peradilan 2023 :

**KEADAAN PERKARA PRA PERADILAN
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2023
PER 31 DESEMBER 2023**

No	Bulan	Sisa Tahun 2022	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1	Januari	1	0	1	0
2	Februari		0	0	0
3	Maret		1	0	1
4	April		1	0	2
5	Mei		1	2	1
6	Juni		0	1	0
7	Juli		0	0	0
8	Agustus		2	1	1
9	September		0	1	0
10	Oktober		1	1	0
11	November		0	0	0
12	Desember		0	0	0
Jumlah		1	6	7	0

1.6. Perkara Pidana Cepat

Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara Pidana Cepat 2023 :

**KEADAAN PERKARA CEPAT
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2023
PER 31 DESEMBER 2023**

No	Bulan	Sisa Tahun 2022	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1	Januari	0	1	1	0
2	Februari		1	1	0
3	Maret		0	0	0
4	April		0	0	0
5	Mei		1	1	0
6	Juni		1	1	0
7	Juli		0	0	0
8	Agustus		0	0	0
9	September		0	0	0
10	Oktober		1	1	0
11	November		0	0	0
12	Desember		1	1	0
Jumlah		0	6	6	0

1.7. Perkara Pidana Lalu- Lintas

Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara Pidana Lalu – Lintas 2023 :

**KEADAAN PERKARA PIDANA LALU LINTAS
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2023
PER 31 DESEMBER 2023**

No	Bulan	Sisa Tahun 2022	Masuk	Putus	Denda	Biaya Perkara
1	Januari	-	71	71	Rp.10.579.000	Rp. 71.000
2	Februari		44	44	Rp 6.556.000	Rp. 44.000
3	Maret		21	21	Rp 3.129.000	Rp. 21.000
4	April		49	49	Rp 5.651.000	Rp. 49.000
5	Mei		102	102	Rp 10.118.000	Rp. 102.000
6	Juni		545	545	Rp 48.455.000	Rp. 545.000
7	Juli		1360	1360	Rp 117.400.000	Rp. 1.360.000
8	Agustus		2122	2122	Rp 277.066.000	Rp. 2.122.000
9	September		2207	2207	Rp 185.363.000	Rp. 2.207.000
10	Oktober		987	987	Rp.173.166.000	Rp. 987.000
11	November		205	205	Rp18.025.000	Rp. 205.000
12	Desember		194	194	Rp 36.052.000	Rp. 194.000
Jumlah		0	7907	7907	Rp 891.560.000	Rp.7.907.000

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

2.1 Perkara Pidana Banding

Berikut ini tabel mengenai Perkara Pidana Banding 2023 :

**KEADAAN PERKARA PIDANA BANDING
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2023
PER 31 DESEMBER 2023**

No	Bulan	Sisa Tahun 2022	Masuk	Banding Yang Dicabut	Banding Yang Dikirim	Sisa
1	Januari	0	4	0	0	4
2	Februari		3	2	4	1
3	Maret		1	0	1	1
4	April		1	0	2	0
5	Mei		1	0	1	0
6	Juni		2	0	2	0
7	Juli		8	0	4	4
8	Agustus		3	0	6	1
9	September		3	0	3	1
10	Oktober		2	0	2	1
11	November		2	0	2	1
12	Desember		3	0	2	2
Jumlah		0	33	2	29	2

3. Keadaan Perkara Pidana Kasasi

3.1 Perkara Pidana Kasasi

Berikut ini tabel mengenai Perkara Pidana Kasasi 2023 :

**KEADAAN PERKARA PIDANA KASASI
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2023
PER 31 DESEMBER 2023**

No	Bulan	Sisa Tahun 2022	Masuk	Kasasi Yang Dicabut	Kasasi Yang Dikirim	Sisa
1	Januari	1	10	0	1	10
2	Februari		0	0	9	1
3	Maret		0	0	1	0
4	April		0	0	0	0
5	Mei		2	0	0	2
6	Juni		1	0	2	1
7	Juli		0	0	1	0
8	Agustus		2	0	1	1
9	September		2	0	1	2
10	Oktober		3	0	2	3
11	November		2	0	4	1
12	Desember		4	0	1	3
Jumlah		1	26	0	23	3

4. Keadaan Perkara Pidana Peninjauan Kembali

4.1 Perkara Pidana Peninjauan Kembali

Berikut ini tabel mengenai Perkara Pidana Peninjauan Kembali 2023 :

**KEADAAN PERKARA PIDANA PENINJAUAN KEMBALI
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2023
PER 31 DESEMBER 2023**

No	Bulan	Sisa Tahun 2022	Masuk	PK Yang Dicabut	PK Yang Dikirim	Sisa
1	Januari	1	1	0	0	2
2	Februari		1	0	2	1
3	Maret		0	0	0	1
4	April		0	0	0	1
5	Mei		0	0	1	0
6	Juni		0	0	0	0
7	Juli		0	0	0	0
8	Agustus		0	0	0	0
9	September		0	0	0	0
10	Oktober		1	0	0	1
11	November		0	0	0	1
12	Desember		0	0	0	1
Jumlah		1	3	0	3	1

5. Keadaan Perkara Perkara Pidana Grasi

5.1 Perkara Pidana Grasi

Berikut ini tabel mengenai Perkara Pidana Grasi 2023 :

**KEADAAN PERKARA PIDANA GRASI
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2023
PER 31 DESEMBER 2023**

No	Bulan	Sisa Tahun 2022	Masuk	Kasasi Yang Dicabut	Kasasi Yang Dikirim	Sisa
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari		-	-	-	-
3	Maret		-	-	-	-
4	April		-	-	-	-
5	Mei		-	-	-	-
6	Juni		-	-	-	-
7	Juli		-	-	-	-
8	Agustus		-	-	-	-
9	September		-	-	-	-
10	Oktober		-	-	-	-
11	November		-	-	-	-
12	Desember		-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Berikut ini tabel mengenai Jumlah sisa Perkara 2022 yang diputus 2023 :

**JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS
PENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2022
PER 31 DESEMBER 2023**

No	Perkara	Sisa Tahun 2022	Putus Tahun 2023	Persentase
1	Permohonan	27	27	100%
2	Gugatan	127	127	100%
3	Pidana Biasa & Pidana Singkat	104	104	100%
4	Pidana Anak	1	1	100%
5	Pidana Pra Peradilan	1	1	100%
6	Pidana Cepat	-	-	-
7	Pidana Lalu Lintas	-	-	-
Jumlah		260	260	100%

2. Berikut ini tabel mengenai Jumlah perkara yang diputus tepat waktu:

**JUMLAH PERKARA YANG PUTUS TEPAT WAKTU
PENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2023
PER 31 DESEMBER 2023**

No	Perkara	Total Perkara	Putus Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Persentase
1	Permohonan	437	436	1	99%
2	Gugatan	312	270	42	86%
3	Pidana Biasa & Pidana Singkat	536	536	-	100%
4	Pidana Anak	37	37	-	100%
5	Pidana Pra Peradilan	6	6	-	100%
6	Pidana Cepat	6	6	-	100%
7	Pidana Lalu Lintas	7907	7907	-	100%
Jumlah		9241	9198	43	99%

3. Berikut ini tabel Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK tahun 2023 :

**JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM
BANDING, KASASI DAN PK
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2023
PER 31 DESEMBER 2023**

No	Perkara	Total Perkara	Mengajukan	Tidak Mengajukan	Persentase
1	Permohonan	437	0	437	100%
2	Gugatan	312	48	264	84,61%
3	Pidana Biasa & Pidana Singkat	551	33	518	94,01%
4	Pidana Anak	37	7	30	81,08%
5	Pidana Pra Peradilan	6	0	6	100%
6	Pidana Cepat	7	0	7	100%
	Jumlah	1350	88	1262	93,48%

4. Berikut ini tabel mengenai Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi:

**JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI
PENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2023
PER 31 DESEMBER 2023**

No	Perkara	Total Perkara	Tidak Berhasil	Berhasil	Berjalan	Persentase
1	Gugatan	167	140	10	12	6%

5. Berikut ini tabel mengenai Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi:

**JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI
DIPENGADILAN NEGERI CIKARANG TAHUN 2023
PER 31 DESEMBER 2023**

No	Perkara	Total Perkara	Tidak Berhasil	Behasil	Persentase
1	Pidana Anak	37	33	4	10,81%

C. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri Cikarang telah terakreditasi dengan nilai A Excellent. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. pada Hari Rabu, tanggal 18 November 2022 di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jalan Ahmad Yani, Jakarta diterima oleh Ketua PN Cikarang bersama dengan 25 ketua pengadilan negeri lainnya.

Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan adalah bentuk penghargaan atas komitmen pengadilan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas yang didasarkan pada kerangka peradilan pengadilan yang unggul (*the framework of courts excellence*) sesuai dengan standar minimal yang telah ditentukan.

a) POSBAKUM

Posbakum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum. Jenis layanan di Posbakum Pengadilan berupa:

- a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Pengadilan Negeri Cikarang pada tahun 2023 dalam program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum nomor SP DIPA-005.03.2.402023/2023 Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) yang diperuntukkan untuk Pos Bantuan Hukum dan target volume output sebesar 312 jam layanan. Dari Anggaran tersebut, sampai dengan akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp24.000.000,00 (100%) dengan capaian volume output sebesar 312 jam layanan.

b) Sidang Keliling

Saat ini belum melaksanakan Sidang Keliling dan belum ada Permohonan Sidang Yustisi yang masuk ke Pengadilan Cikarang

c) Perkara Prodeo

Saat ini ada 2 Perkara Prodeo yang masuk ke Pengadilan Cikarang

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kualitas, integritas, dan kinerja individu yang bekerja didalamnya, apabila integritas dan kinerja individu yang bekerja diorganisasi tersebut tidak berkualitas dan profesional, maka akan menjadi kendala dalam menjalankan suatu sistem yang berorientasi hasil (*result oriented*) dan berbasis pada kinerja. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang tinggi dan mempunyai komitmen, semangat serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena suatu sistem yang berbasis kinerja hanya akan menghasilkan output yang memuaskan apabila sistem tersebut dikendalikan dan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka mensinergikan program pengembangan SDM yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Cikarang dengan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan suatu Pengadilan yang Unggul (*Court Excellence*) dan suatu Badan Peradilan Indonesia yang Agung maka Pengadilan Negeri Cikarang mencoba menuangkan misi dan agenda perubahan dalam bentuk peningkatan kapasitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Cikarang telah senantiasa meningkatkan kualitas dan profesionalisme bagi Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional, maupun seluruh staf

Keadaan jumlah pegawai Pengadilan Negeri Cikarang dengan Ketua, Wakil dan Hakim yang ada sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah 49 dengan perincian:

Ketua	: 1	Orang
Wakil Ketua	: 1	Orang
Hakim	: 11	Orang
Panitera	: 1	Orang
Sekretaris	: 1	Orang
Panitera Muda Hukum	: 1	orang
Panitera Muda Perdata	: 1	Orang
Panitera Muda Pidana	: 1	Orang
Ka.Sub.Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	: 1	Orang
Ka.Sub.Bag Umum dan Keuangan	: 1	Orang
Ka.Sub.Bag. Perencanaan, Informasi Teknologi Pelaporan	: 1	Orang
Panitera Pengganti	: 11	Orang
Juru sita	: 3	Orang

Juru Sita Pengganti/Staf	: 1	Orang
Staf {PNS}	: 9	Orang
Staf (PPPK)	: 1	Orang

Sedangkan tenaga honorer yang ada:

- Satpam : 2 Orang
- Pengemudi : 2 Orang
- Kebersihan : 4 orang

a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan :

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	II	4
2	III	38
3	IV	4

b. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S3	-
2	S2	15
3	S1	26
4	DIII	5
5	SLTA	-
6	SLTP	-

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Pada Pengadilan Negeri Cikarang, Hakim yang ada sampai dengan 31 Desember 2023 sejumlah 13 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Adapun nama-nama hakim yang ada adalah sebagai berikut

- Ketua : HENDRI AGUSTIAN, S.H, M.Hum.
- Wakil Ketua : HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H., M.H.
- Hakim-hakim :
 - 1 YUDHA DINATA, S.H.
 - 2 AGUS SOETRISNO, S.H.
 - 3 RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.
 - 4 SUHADI PUTRA WIJAYA, S.H.
 - 5 ISNANDAR SYAHPUTRA, S.H., M.H.
 - 6 KHALID SOROINDA, S.H, M.H.

- 7 MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H., M.Kn.
- 8 MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H.
- 9 VITA DELIANA, S.H.
- 10 SONDR A MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.
- 11 TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.

Disamping sebagai Majelis Hakim para Hakim mempunyai tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang dengan susunan menyesuaikan dengan jumlah Hakim pada kurun waktu tersebut diatas, dan bertugas secara *rolling* sehingga para Hakim secara merata dapat bertugas secara menyeluruh bergantian kepada masing-masing Sub Bagian Administrasi Kepaniteraan maupun Kesekretariatan,

2. Mutasi

a. Mutasi Masuk

No.	NAMA	Jabatan	Satker Asal	TMT
1.	AGUNG NUGROHO, S.T.	SEKRETARIS	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	27-Feb-23
2.	SAMUEL, S.E.	ANALIS TATA LAKSANA	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	29-Mei-23
3.	FRANS SISCA NURHAYATI, S.E., M.H.	PANITERA PENGGANTI	PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA	6-Jun-23
4.	APRISNO, S.H., M.H.	PANITERA MUDA PIDANA	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	23-Jun-23
5.	SARNI, S.H., M.H.	PANITERA MUDA HUKUM	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	23-Jun-23
6.	VINI IMANUELLA, S.H.	PANITERA PENGGANTI	PENGADILAN NEGERI DEPOK	23-Jun-23
7.	YUNIWATI, S.T.	PANITERA PENGGANTI	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	23-Jun-23
8.	JOHAN RISKI TAMBA, A.Md.A.B.	ARSIPARIS/ PELAKSANA TERAMPIL	PPPK	1-Sep-23
9.	AGUS UTOMO, S.H.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	PENGADILAN NEGERI BEKASI	27-Okt-23
10.	HENDRI AGUSTIAN, S.H., M.Hum.	KETUA	PENGADILAN NEGERI BATURAJA	15-Dec-23
11.	HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN	29-Dec-23

b. Mutasi Keluar

No.	NAMA	Jabatan	Satker Tujuan	TMT
1.	NIHIL			

3. Promosi

No.	NAMA	Jabatan Lama	Jabatan Baru	TMT
1.	NURMA SAOFIANE, S.H.	Sekretaris Pengadilan Negeri Cikarang	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Sukabumi	3 Januari 2023
2.	MARTHA G. AMALO, S.E., M.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Cikarang	Sekretaris Pengadilan Negeri Banjar	3 Januari 2023
3.	CHANDRA RAMADHANI, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Cikarang	Hakim Pengadilan Negeri Brebes	28 Februari 2023
4.	ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Cikarang	Hakim Pengadilan Negeri Karawang	28 Februari 2023
5.	HUSNA MACHMUD, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Cikarang	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bogor	17 April 2023
6.	DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Cikarang	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Depok	17 April 2023
7.	RIEN RAYHANAH NOOR, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong	17 April 2023
8.	ADANG SUJANA, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang	17 April 2023
9.	ELI SUSILAWATI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang	Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang	17 April 2023

10.	DEVRI ANDRI, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Cikarang	Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI	24 Oktober 2023
11.	RIZKI RAMADHAN, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Cikarang	Hakim Pengadilan Negeri Subang	24 Oktober 2023
12.	EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Cikarang	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto	6 November 2023
13.	ASYROTUN MUGIASTUTI, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang	Ketua Pengadilan Negeri Banyumas	6 November 2023
14.	SUSILO NANDANG BAGIO, S.H., M.H.	Panitera Pengadilan Negeri Cikarang	Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung	27 November 2023
15.	RANGGA WIDYARACHMAN, S.H., M.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong	27 November 2023
16.	THORICO MONADA, S.H., M.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong	27 November 2023

4. Pensiun

No.	NAMA	Jabatan	Pangkat	TMT	Keterangan
	NIHIL				

5. Diklat

No.	NAMA	Jabatan	Jenis Diklat
1	AGUS SOETRISNO, SH.	HAKIM	1. Pelatihan Pemantapan KEPPH dari Komisi Yusial Republik Indonesia
2	ISNANDAR SYAHPUTRA, SH.,MH.	HAKIM	1. Bintek Pelayanan Hukum Disabilitas Tahun Anggaran 2023 2. Pelatihan Gugatan Sederhana dan Online Dispute dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen 3. Pelatihan Pemeriksaan Perkara TPPU bagi Hakim Peradilan Umum

3	RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.	HAKIM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Pemantapan KEPPH dari Komisi Yusial Republik Indonesia 2. Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Anak Terpadu
4	TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.	HAKIM	Pelatihan Pemantapan KEPPH dari Komisi Yusial Republik Indonesia
5	SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, SH.	HAKIM	Pelatihan Pemantapan KEPPH dari Komisi Yusial Republik Indonesia
6	VITA DELIANA, SH.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Pemantapan KEPPH dari Komisi Yusial Republik Indonesia 2. Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Anak Terpadu 3. Pelatihan Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada
7	KHALID SOROINDA,SH.,MH	HAKIM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Gugatan Sederhana dan Online Dispute dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen 2. Pelatihan Pemeriksaan Perkara TPPU bagi Hakim Peradilan Umum
8	MAHARTHA NOERDIANSYAH, SH.	HAKIM	Pelatihan Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada
9	RIZKI RAMADHAN, SH.	HAKIM	Pelatihan Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada
10	AGUNG NUGROHO, ST.	SEKRETARIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Teknis Kepegawaian pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung Tahun Anggaran 2023 2. Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Administrasi Peradilan bagi Sekretaris Pengadilan 3. Bimbingan Teknis Kesekretariatan pada Wilayah Hukum Pengadilan

			Tinggi Bandung Tahun Anggaran 2023 4. Bintek Pelayanan Hukum Disabilitas Tahun Anggaran 2023
11	MUHAMMAD IDRIS HASAN, SH., MH.	Panitera Pengganti	Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Umum
12	SARI NURHAYATI, SE.	Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	1. Bimbingan Teknis Kepegawaian pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung Tahun Anggaran 2023 2. Bimbingan Teknis Kesekretariatan pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung Tahun Anggaran 2023
13	DESIANA RAHMAWATI, SH	Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Bintek Bendahara Pengeluaran Angkatan II Tahun Anggaran 2023
14	CAROLINA TARULI VIENNA, SH.	Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara
15	BODRO AJI NEGORO, SH.	Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara
16	FAJAR RAHMADHANI, A. Md.	Pengelola Perkara	Pelatihan Kedisiplinan PNS Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung
17	APRI ANJUANRICO SIAHAAN, A. Md.	Pengelola Perkara	Pelatihan Kedisiplinan PNS Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung
18	JOHAN RISKI TAMBA, A.Md.,A.B.	Arsiparis Pelaksana	Pelatihan Orientasi PPPK Tahun Anggaran 2023

7. Pengisian Jabatan Struktural

Dalam rangka pengembangan profesionalisme Jabatan baik Struktural maupun fungsional dan untuk menjamin obyektifitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja maka guna meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keunggulan yang kompetitif dalam memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat, Pengadilan Negeri Cikarang telah melakukan langkah-langkah dalam pengusulan maupun pengisian Jabatan yang kosong. Dan masih mengacu pada

Undang-Undang No.8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah No.100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural.

Untuk menciptakan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang profesional sekaligus menampilkan sosok pejabat Struktural dalam pengangkatan dan pengisian jabatan struktural dengan cara menerapkan sistem keterbukaan dan penetapan persyaratan jabatan yang terukur bagi pegawai negeri sipil. Sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku dengan mengacu sistem sebagai berikut:

1. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil pegawai yang akan diangkat menduduki jabatan struktural.
2. Pendidikan formal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pangkat / Gol. Ruang serta masa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Dipandang cakap dan mampu untuk menduduki jabatan tersebut dengan cara melakukan uji kompetensi (kepatutan dan kelayakan) yang dilakukan oleh Tim Baperjakat Pengadilan Negeri Cikarang. Dan apabila lulus dan memenuhi syarat untuk diusulkan menduduki jabatan/ mengisi jabatan tersebut.

Pada tahun 2023 susunan pejabat struktural pada Pengadilan Negeri Cikarang adalah sebagai berikut :

1. Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang : HENDRI AGUSTIAN, S.H., M.Hum. pengambilan sumpah dan pelantikan pada tanggal 15 Desember 2023
2. Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang : HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H, M.H. Pengambilan sumpah dan pelantikan pada tanggal 29 Desember 2023 .
3. Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang : SUSILO NANDANG BAGIO, S.H., M.H. Pengambilan sumpah dan pelantikan pada tanggal 2 Desember 2022
4. Jabatan Sekretaris Pengadilan Negeri Cikarang : AGUNG NUGROHO, S.T. Pengambilan sumpah dan pelantikan pada tanggal 27 Februari 2023
5. Jabatan Struktural Panitera Muda Perdata : DWI IRA MARWANTI, S.H, M.H. pengambilan sumpah dan pelantikan pada tanggal 9 Desember 2022
6. Jabatan Struktural Panitera Muda Pidana : APRISNO, S.H., M.H. Pengambilan sumpah dan pelantikan pada tanggal 23 Juni 2023
7. Jabatan Struktural Panitera Muda Hukum : SARNI, S.H, M.H. pengambilan sumpah dan pelantikan pada tanggal 23 Juni 2023
8. Jabatan Struktural Kasub Umum dan Keuangan : AGUS UTOMO, S.H. pengambilan

sumpah dan pelantikan pada tanggal 27 Oktober 2013

9. Jabatan Struktural Kasub Organisasi dan Tata Laksana : SARI NURHAYATI, S.E.
pengambilan sumpah dan pelantikan pada tanggal 26 Oktober 2018
10. Jabatan Struktural Kasub Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan :
DESIANA RAHMAWATI, S.H. Pengambilan sumpah dan pelantikan pada tanggal 12
November 2021.

BAB IV
PENGELOLA KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA,
DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan pada Pengadilan Negeri Cikarang selama satu tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dikelola semaksimal mungkin guna mencapai target dan pengelolaan keuangan yang sangat baik dan transparan teroganisir secara cepat dan tepat, Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan anggaran pelaksanaan dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan serta sebagai bahan evaluasi perencanaan tahun anggaran berikutnya.

Anggaran tertuang dalam DIPA dan RKA-KL / POK (Petunjuk Operasional Kegiatan). Ada 2 (dua) DIPA/POK pada satuan kerja Pengadilan Negeri Cikarang, Yaitu DIPA 005.01 untuk eselon 1 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 005.03 untuk Eselon 1 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Tahun Anggaran 2023 alokasi untuk masing-masing DIPA adalah :

1. DIPA 005.01 (Badan Urusan Administrasi) sebesar **Rp. 13.873.195.000** (Tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta serratus Sembilan puluh lima ribu)
2. DIPA 005.03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) sebesar **Rp. 271.500.000**

Pelaksanaan DIPA tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. DIPA 005.01 (Badan Urusan Administrasi)
Yaitu sebesar Rp. 13.873.195.000 (Tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta serratus Sembilan puluh lima ribu) terperinci untuk mencapai output program kegiatan yang telah ditentukan.

Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Belanja :

NO	KELOMPOK BELANJA	JUMLAH
1.	BELANJA PEGAWAI	Rp. 6.303.676.000
2.	BELANJA BARANG	Rp. 1.574.209.000
3.	BELANJA MODAL	Rp. 5.995.310.000

Rincian DIPA Berdasarkan Program/ Kegiatan :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH
005.01.01	[Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung]	
1066	[Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi]	
	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	Rp. 7.476.000
	Layanan Perkantoran	
	Gaji dan Tunjangan	Rp. 6.303.678.000
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 1.566.733.000
005.01.02	[Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung]	
1071	[Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung]	
	Layanan Internal Pengadaan Sarana dan Prasarana	Rp. 5.995.310.000

Dalam perjalanannya, DIPA 005.01 mengalami beberapa kali revisi. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan pelaksanaan DIPA. Berikut adalah revisi yang dilakukan terhadap DIPA 01 :

Revisi Anggaran Dipa 01

NO	JENIS REVISI	TANGGAL PENGESAHAN
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (401915)		
1	REVISI KANWIL DJPB	01 Februari 2023
2	REVISI KANWIL DJPB	20 Februari 2023
3	REVISI KANWIL DJPB	14 Maret 2023
4	REVISI KANWIL DJPB	20 Maret 2023
5	REVISI KANWIL DJPB	15 April 2023
6	REVISI KANWIL DJPB	28 April 2023
7	REVISI KANWIL DJPB	18 Juli 2023
8	REVISI KANWIL DJPB	21 September 2023
9	REVISI KANWIL DJPB	23 Oktober 2023
10	REVISI KANWIL DJPB	24 November 2023
11	REVISI KANWIL DJPB	27 Desember 2023

Pelaksanaan Pengelolaan keuangan tahun 2023 untuk DIPA 005.01 Pengadilan Negeri Cikarang adalah sebesar 97,04%

Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2022 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2022			TA 2023		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	6.702.108.000	6.688.179.115	99,79 %	6.303.676.000	5.902.239.244	93,63 %
2.	Belanja Barang	1.876.421.000	1.857.289.911	98,98 %	1.574.209.000	1.574.209.000	99,41 %
3.	Belanja Modal	1.439.514.000	1.370.027.730	95,17 %	5.995.310.000	5.995.277.025	100%

2. **DIPA 005.03** (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum)

Yaitu sebesar Rp. 271.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) terperinci untuk mencapai output program kegiatan yang telah ditentukan.

Dalam perjalanannya, DIPA 005.03 mengalami beberapa kali revisi. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan pelaksanaan DIPA. Berikut adalah revisi yang dilakukan terhadap DIPA 03 :

Revisi Anggaran DIPA 03

No	Jenis Revisi	Tanggal Pengesahan
1	Revisi DJPB, Revisi 1	20-02-2023
2	Revisi DJPB, Revisi 2	15-04-2023
3	Revisi DJPB, Revisi 3	18-10-2023
4	Revisi DJPB, Revisi 4	24-11-2023
5	Revisi DJPB, Revisi 5	27-12-2023

Pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2023 untuk DIPA 005.03 Pengadilan Negeri Cikarang adalah sebesar 99,96% dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2022 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2023			TA 2022		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Operasional	271.500.000	271.386.892	99,96	322.490.000	318.690.334	98,82%
Total Realisasi Anggaran (%)		99,96%			98,82%		

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

SARANA DAN PRASARANA GEDUNG

A. Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Cikarang ;

- a) Letak di Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
- b) Luas Bangunan Kantor : 3744 m²
- c) Luas Bangunan Gedung Tempat Ibadah : 80 m²
- d) Luas Kantin : 60 m²
- e) Rumah Dinas ;

Jumlah keseluruhan tempat tinggal 5 Unit sebagai berikut ;

No.	Alamat Rumah Dinas	Kondisi	Luas Bangunan	Penghuni	Sertifikat A.n
1	Florenzia, Jl. Alam Lestari III No. 65	Baik	113 m ²	Ketua PN Cikarang	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI
2	Cosmo, Jl. Alam Surya Selatan V No. 18	Baik	87 m ²	Wakil Ketua PN Cikarang	Pemerintah RI
3	Water Front, Jl. Main Riverside No. 50	Baik	67 m ²	Panitera PN Cikarang	Cq. Mahkamah Agung RI
4	Water Front, Jl. East Riverside No. 17	Baik	67 m ²	Hakim PN Cikarang	Pemerintah RI
5	Water Front, Jl. Riverside I No. 32	Baik	50 m ²	Sekretaris PN Cikarang	Cq. Mahkamah Agung RI

B. Area Kerja dan Sarana Prasarana

Adapun yang menjadi Ruangan Area Kerja di Pengadilan Negeri Cikarang yaitu ;

1. PTSP
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Terletak di Lantai 1 di Loby Utama gedung Pengadilan Negeri Cikarang.
2. Ruangan Panitera Muda Perdata
Ruangan Panitera Muda Perdata terletak di bagian lantai 1 gedung Pengadilan Negeri Cikarang.
3. Ruangan Panitera Muda Hukum
Ruangan Panitera Muda Hukum terletak di bagian lantai 1 gedung Pengadilan Negeri Cikarang.
4. Ruangan Panitera Muda Pidana
Ruangan Panitera Muda Pidana terletak di bagian lantai 1 gedung Pengadilan Negeri Cikarang.
5. Ruangan Back Office
Ruangan Back Office Berada di lantai 1 gedung Pengadilan Negeri Cikarang.
6. Ruangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang
Ruangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang terletak di bagian lantai 2 gedung Pengadilan Negeri Cikarang.
7. Ruangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang
Ruangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang terletak di bagian lantai 2 gedung Pengadilan Negeri Cikarang.
8. Ruangan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang
Ruangan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang terletak di bagian lantai 2 gedung Pengadilan Negeri Cikarang.
9. Ruangan Sekretaris Pengadilan Negeri Cikarang
Ruangan Sekretaris Pengadilan Negeri Cikarang terletak di bagian lantai 2 gedung Pengadilan Negeri Cikarang.
10. Ruangan Hakim
Ruangan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang terletak di bagian lantai 2 gedung Pengadilan Negeri Cikarang.
11. Ruangan PTIP
Ruangan PTIP Pengadilan Negeri Cikarang terletak di bagian lantai 2 gedung Pengadilan Negeri Cikarang.
12. Ruangan Umum dan Keuangan

Ruang Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Cikarang terletak di bagian lantai 2 gedung Pengadilan Negeri Cikarang.

13. Ruangan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Cikarang terletak di bagian lantai 2 gedung Pengadilan Negeri Cikarang.

14. Ruangan Jurusita

Ruang Jurusita berada di lantai 2 gedung Pengadilan Negeri Cikarang.

15. Ruangan Panitera Pengganti

Ruang Panitera Pengganti berada di lantai 2 gedung Pengadilan Negeri Cikarang.

Adapun yang menjadi Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Cikarang yaitu;

1. Meja Informasi

Meja informasi dan pengaduan yang terletak di lobi utama, berfungsi sebagai sarana Informasi, pendaftaran sidang, dan pengaduan bagi masyarakat yang berkepentingan.

2. Ruangan Posbakum

Ruangan yang diperuntukkan untuk memberikan advice dan bantuan hukum bagi pihak pihak yang sedang mengalami permasalahan hukum dan tidak mampu secara financial.

3. Ruang Mediasi.

Ruang mediasi adalah ruangan yang terletak di gedung sidang Pengadilan yang diperuntukkan bagi para pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi.

4. Ruangan Bank BTN

Ruang Bank BTN saat ini terletak di samping Ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

5. Ruangan Tunggu Tamu Terbuka

Ruang Tunggu Tamu Terbuka Terletak di lantai 1 gedung Pengadilan Negeri Cikarang.

6. Ruang Sidang

Terdapat 6 (Enam) Ruang sidang di Pengadilan Negeri Cikarang yaitu, Ruang Sidang Kartika, Ruang Sidang Tirta, Ruang Sidang Sari, Ruang Sidang Cakra, Ruang Sidang Candra, dan Ruang Sidang Anak, Seluruh Ruang Sidang berada di lantai 1 gedung Pengadilan Negeri Cikarang.

7. Area Tunggu Sidang

Ruangan Area Tunggu Sidang berada di Lantai 1 gedung Pengadilan Negeri Cikarang.

8. Ruang Advokat/Pengacara
Ruang Advokat berada di lantai 1 gedung Pengadilan Negeri Cikarang.
9. Ruang Tunggu Ramah Anak
Ruang Tunggu Ramah Anak Laki-laki dan Wanita Berada di lantai 1 gedung Pengadilan Negeri Cikarang.
10. Ruang Ibu Menyusui
Ruang untuk Ibu menyusui berada di dalam Ruang Tunggu Ramah Anak.
11. Toilet
Ruang Toilet berada di lantai 1 dan 2 yang dipergunakan oleh Umum dan Pegawai yang berada dilingkungan Pengadilan Negeri Cikarang.
12. Ruang Tahanan
Ruang Tahanan Laki-laki dan Wanita berada di lantai 1 gedung Pengadilan Negeri Cikarang.
13. Ruang Kesehatan
Ruang Kesehatan berada di lantai 1 gedung Pengadilan Negeri Cikarang.
14. Ruang Jaksa
Ruang Jaksa berada di lantai 1 gedung Pengadilan Negeri Cikarang.
15. Ruang Tunggu Saksi Anak
Ruang Tunggu Saksi Anak berada dilantai 1 gedung Pengadilan Negeri Cikarang.
16. Ruang Tunggu Pekerja Sosial
Ruang Tunggu Pekerja Sosial berada dilantai 1 gedung Pengadilan Negeri Cikarang.
17. Area Parkir
Terdapat 2 Area Parkir yang berada di Basement yang dipergunakan untuk tempat parkir pegawai dan mobil tahanan serta area parkir terbuka yang berada di depan gedung Pengadilan Negeri Cikarang yang digunakan khusus untuk Pengunjung Pengadilan Negeri Cikarang.

1. Kendaraan dinas pada Pengadilan Negeri Cikarang

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	RR	RB	
I. Jenis Kendaraan Roda 4						
1.	Mitsubishi	-	√			Pinjam Pakai dari MA
2	Toyota/ Fortuner	-	√			Pinjam Pakai dari Pemkab Bekasi
3	Toyota/Kijang Inova V AT	-	√			Sewa Pakai dari MA
4	Toyota/ Rush 1,5 G A/T	2019	√			
5	Avanza	2022	√			
II. Jenis Kendaraan Roda 2						
1	Aerox	2019	√			
2	Aerox	2019	√			

2. Kondisi Sarana, Prasarana, Peralatan dan Mesin

a) Kondisi Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Barang	Kondisi Barang				Ket.
		Jumlah	Baik	RR	RB	
1	Ruang Ketua	1	√			
2	Ruang Wakil Ketua	1	√			
3	Ruang Hakim	2	√			
4	Ruang Sekretaris	1	√			
5	Ruang Panitera	1	√			
6	Ruang Sidang Umum	5	√			

7	Ruang Sidang Anak	1	√			
8	Ruang Kesekretariatan	3	√			
9	Ruang Kepaniteraan	4	√			
10	Ruang Tunggu Tamu Terbuka	1	√			
11	Ruang Bank BTN	1	√			
12	Ruang Posbakum	1	√			
13	Ruang Diversi	1	√			
14	Ruang Ramah Anak	1	√			
15	Ruang Advokat/Pengacara	1	√			
16	Ruang Command Center	1	√			
17	Ruang Perpustakaan	1	√			
18	Ruang Jurusita	1	√			
19	Ruang Musyawarah Hakim	1	√			
20	Ruang Tunggu Ramah Anak	2	√			
21	Ruang Tahanan	2	√			
22	Ruang Saksi Anak	1	√			
23	Ruang Tunggu Pekerja Sosial	1	√			
24	Ruang Jaksa	1	√			

b) Peralatan dan Mesin

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi Barang			Ket
				Baik	RR	RB	
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	2	√			
2	Sepeda Motor	Unit	2	√			
3	Lemari Penyimpan	Buah	47	√			
4	Lemari Kayu	Buah	12	√			
5	Rak Besi	Buah	3	√			
6	Filing Cabinet Besi	Buah	41	√			
7	Filing Cabinet Kayu	Buah	8	√			
8	Brandkas	Buah	2	√			
9	Lemari Display	Buah	2	√			
10	CCTV - Camera Control Television System	Buah	42	√			
11	Mesin Absensi	Buah	1	√			
12	Papan Pengumuman	Buah	1	√			
13	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	45	√			
14	Meja Kerja Kayu	Buah	50	√			
15	Kursi Besi/Metal	Buah	172	√			
16	Kursi Kayu	Buah	6	√			
17	Sice	Buah	9	√			
18	Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	75	√			
19	Meja Rapat	Buah	4	√			
20	Meja Resepsionis	Buah	1	√			
21	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	3	√			
22	Partisi	Buah	2	√			
23	Rak Sepatu (Almunium)	Buah	1	√			
24	Nakas	Buah	9	√			
25	Meja Taman	Buah	1	√			
26	Sofa	set	9	√			
27	A.C. Split	Buah	12	√			
28	Kipas Angin	Buah	4	√			
29	Mixer	Buah	3	√			
30	Televisi	Buah	0	√			
31	Loudspeaker	Buah	42	√			
32	Sound System	Buah	4	√			
33	Wireless	Buah	6	√			
34	Microphone	Buah	7	√			
35	Microphone Table Stand	Buah	25	√			
36	Tiang Bendera	Buah	5	√			
37	Pataka	Buah	12	√			
38	Palu Sidang	Buah	2	√			
39	Lambang Instansi	Buah	1	√			
40	Kabel	Buah	3	√			

41	Bingkai Foto	Buah	8	√			
42	Bracket Standing Peralatan	Buah	1	√			
43	Audio Mixing Console	Buah	1	√			
44	Microphone/Wireless MIC	Buah	3	√			
45	Microphone/Boom Stand	Buah	3	√			
46	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	5	√			
47	Camera Digital	Buah	1	√			
48	LCD Monitor	Buah	1	√			
49	Camera Conference	Buah	1	√			
50	Telephone (PABX)	Buah	1	√			
51	Genset	Buah	2	√			
52	Kursi Dorong	Buah	1	√			
53	Kursi Zeis	Buah	64	√			
54	TV Monitor	Buah	11	√			
55	Personal Computer	Buah	1	√			
56	Gate/Protal Monitor	Buah	1	√			
57	DC / AC Power Supply	Buah	3	√			
58	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	√			
59	P.C Unit	Buah	32	√			
60	Lap Top	Buah	11	√			
61	Speaker Komputer	Buah	3	√			
62	Monitor	Buah	1	√			
63	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	18	√			
64	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	√			
65	External/ Portable Hardisk	Buah	6	√			
66	Server	Buah	2	√			
67	Router	Buah	1	√			
68	Rak Server	Buah	2	√			
69	Switch	Buah	1	√			
70	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	Unit	4	√			
				√			

Pemeliharaan dan Perawatan

Dalam setahun ini kegiatan pemeliharaan dan perawatan di Sub Bagian Umum dan Keuangan antara lain :

1. Mengkoordinir seluruh asset dan Barang setiap bulan;
2. Belanja ATK setiap bulan 2 kali;
3. Memperpanjang pajak kendaraan dinas Roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat);
4. Perbaikan dan perawatan kendaraan dinas roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat);

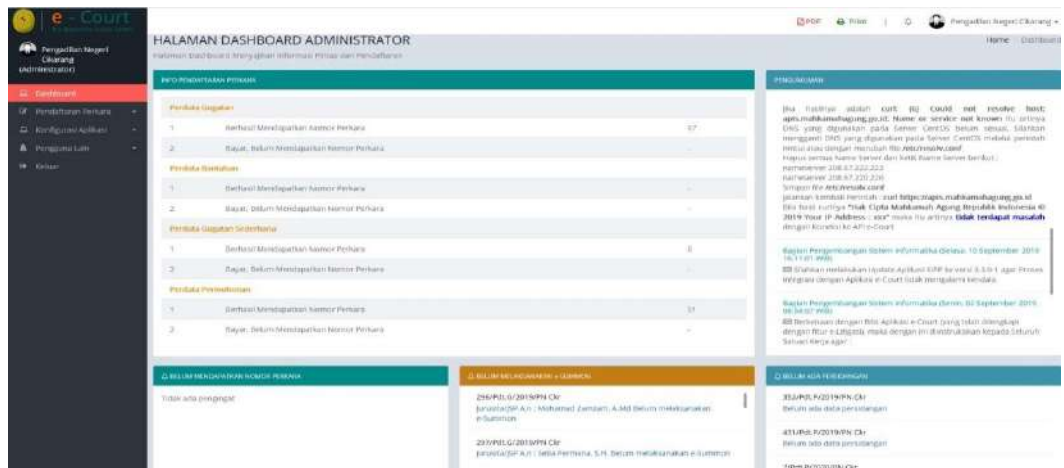
5. Perawatan dan pemeliharaan AC, Komputer sekali 4 bulan / membutuhkan perbaikan / masih bisa diperbaiki;
6. Perawatan Meubelair yang masih bisa diperbaiki;
7. Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor;
8. Mengkoordinir seluruh tugas satuan pengamanan (SATPAM), Petugas kebersihan (Cleaning Services);
9. Mengkoordinir Internet, Mengagendakan Surat Masuk dan Surat Keluar;
10. Mengantarkan surat dan mengambil surat ke kantor POS dan GIRO;
11. Mencatat Barang Milik Negara kedalam Aplikasi SIMAK BMN;
12. Pembuatan DBR, KIB 1 tahun sekali / saat ada penggantian pimpinan dan perpindahan BMN;
13. Melaksanakan Rekon kantor KPKLN, membuat laporan SABMN, Semesteran, Tahunan;
14. Melaksanakan pembuatan laporan bulanan dan Tahunan Kegiatan Administrasi Umu; Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pengadilan Negeri Cikarang antara lain:
 1. Pengecatan dinding luar dan dalam gedung kantor biaya DIPA TA 2023;
 2. Perawatan kendaraan bermotor Roda 4 (empat) unit dan pembayaran pajaknya sebanyak 5 unit biaya dari DIPA TA 2023;
 3. Perawatan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan pembayaran perpanjangan pajak sebanyak 2 (dua) unit biaya dari DIPA TA 2023;
 4. Perawatan Printer sebanyak 9 (Sembilan) unit biaya dari DIPA TA 2023;
 5. Perawatan Perangkat Computer (PC) sebanyak 18 (delapan belas) unit biaya dari DIPA TA 2023;
 6. Perawatan Laptop sebanyak 7 (tujuh) unit biaya dari DIPA TA 2023;
 7. Perawatan AC sebanyak 25 (dua puluh lima) unit biaya dari DIPA TA 2023;Perawatan Genset sebanyak 1 (satu) unit biaya dari DIPA TA 2023.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk mendukung terlaksanakannya administrasi dan pelayanan secara umum Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II telah mengimplemasikan e- court dan SIPP:

1. Implementasi e- court

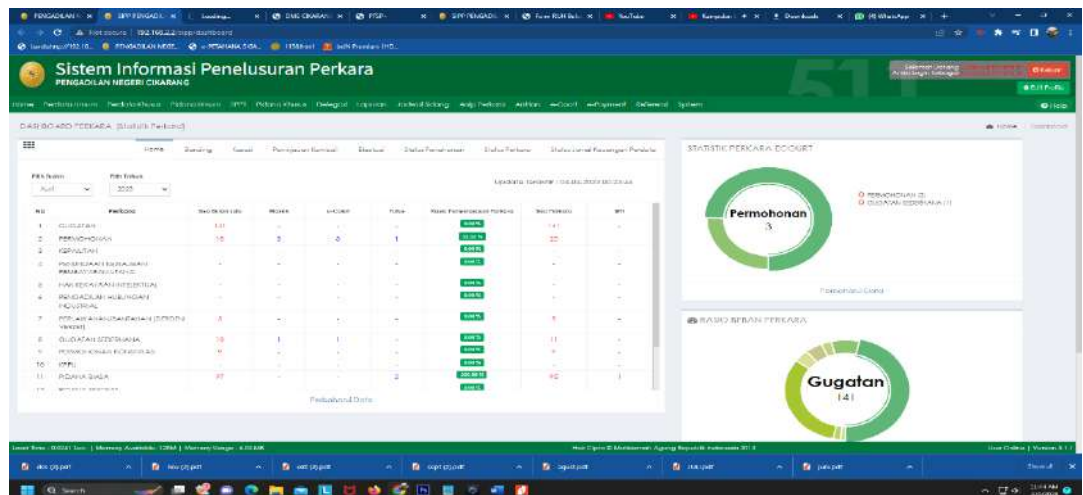
Pengadilan Negeri Cikarang Sudah Mengimplementasikan e-court sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 272/DJU/HM02.3/3/2021



2. Implementasi SIPP

Infrastruktur Perangkat Keras (*hardware*)

Pengadilan Negeri Cikarang Sudah Mengimplementasikan SIPP sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71/KMA/SK/IV/2021



3. E-COURT

E-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara *Online*, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara *online*, Pembayaran secara *online*, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

E-Court terdiri dari :

1. *E-Filling* (Pendaftaran Perkara *Online* di Pengadilan)
2. *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara *Online*)
3. *E-Summons* (Pemanggilan Pihak Secara *Online*)
4. *E-Litigation* (Persidangan Secara *Online*)

Rincian jumlah perkara pada Pengadilan Negeri Cikarang dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 14 Desember 2023 yang didaftarkan melalui *E-court*, dijelaskan pada tabel di bawah

INFO PENDAFTARAN PERKARA		
Gugatan		
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	1224
2	Bayar, Belum Mendapatkan Nomor Perkara	0
Permohonan		
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	1322
2	Bayar, Belum Mendapatkan Nomor Perkara	2
Bantahan		
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	19
2	Bayar, Belum Mendapatkan Nomor Perkara	0
Gugatan Sederhana		
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	192
2	Bayar, Belum Mendapatkan Nomor Perkara	0
Permohonan Konsinyasi		

4. SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. SIPP merupakan aplikasi teknologi berbasis *web* dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah

Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Kembali

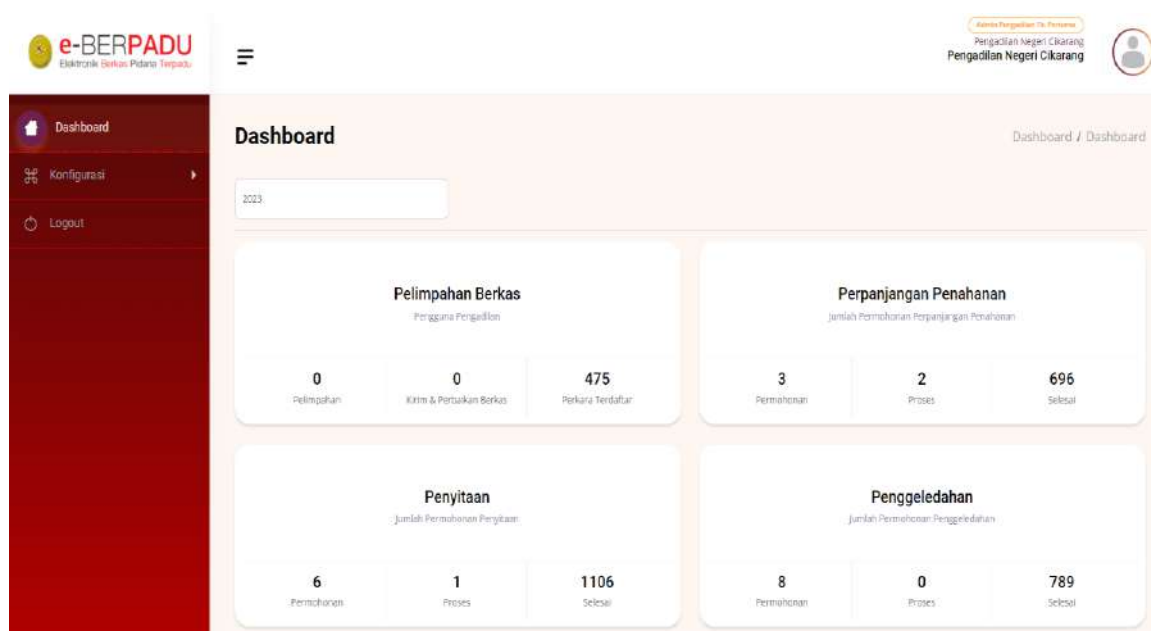
No	Kode	Tipe	Nama Pengadilan
10	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Subang	145.39	546.86	94.00	183.86	★★★★★	970.11
11	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Cirebon	142.21	540.35	101.94	185.32	★★★★★	969.82
12	1-500	II	Pengadilan Negeri Kuningan	147.17	534.55	101.96	164.64	★★★★★	969.52
13	>2000	IA	Pengadilan Negeri Bale Bandung	148.35	531.92	120.43	167.09	★★★★★	968.29
14	1-500	II	Pengadilan Negeri Banjar	149.07	531.77	102.00	185.11	★★★★★	967.95
15	1001-2000	IB	Pengadilan Negeri Karawang	144.73	543.37	93.80	185.02	★★★★★	967.82
16	1-500	II	Pengadilan Negeri Majalengka	146.56	541.52	93.76	185.56	★★★★★	967.39
17	>2000	IA Khusus	Pengadilan Negeri Bekasi	145.99	530.17	120.03	168.61	★★★★★	964.80
18	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Sumedang	145.04	531.51	101.95	185.45	★★★★★	964.75
19	501-1000	IA	Pengadilan Negeri Sumber	148.22	542.10	108.60	164.08	★★★★★	963.00
20	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Sukabumi	141.71	536.32	93.76	183.43	★★★★★	960.21
21	1001-2000	IA	Pengadilan Negeri Depok	144.60	531.82	120.64	157.01	★★★★★	954.07
22	1001-2000	II	Pengadilan Negeri Cikarang	137.52	530.01	101.30	182.48	★★★★★	951.31
23	>2000	IA Khusus	Pengadilan Negeri Bandung	143.67	495.88	120.20	162.34	★★★★★	922.09

5. E-BERPADU

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian (termasuk Badan Narkotika nasional), Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Pengeledahan
3. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembantaran Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan *Online* oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan

Aplikasi e-BERPADU diluncurkan pada tanggal 19 Agustus 2022 oleh Ketua Mahkamah Agung RI, serta telah dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 238/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba. Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e- BERPADU) dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik .



Berikut adalah perangkat keras pendukung implementasi teknologi informasi yang digunakan pada Pengadilan Negeri Cikarang.

No	Nama Perangkat	Jumlah	Keterangan
1	Server Dell Power EDGE 330	2	
2	Mikrotik RouterBoard 1100AHx4	1	
3	PC Unit All In One HP	24	
4	Laptop Lenovo IdeaPad 320	4	
5	Laptop Fujitsu	3	
6	Laptop Axio Mybook Pro K3	4	
6	Serial Printer Hp Smart Tank 510	4	
7	Printer Epson L3150	8	
8	Printer Epson L3110	4	
9	Printer Epson L120	9	
7	Switch Tp-Link Gigabit 32 Port	3	
8	Switch Tp-Link Gigabit 32 Port	1	
9	Ruijie	37	

2. Perangkat Lunak (*Software*)

Untuk mendukung kinerja Satker selain aplikasi perkantoran yang umum digunakan, digunakan pula beberapa aplikasi khusus internal di lingkungan Mahkamah Agung untuk mendukung pelayanan utama pada Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II.

No	Nama Aplikasi	Keterangan
1	Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	Server local, hosting dan User MA
2	Monitoring SIPP	Server lokal
3	Direktori Putusan	Server local, hosting dan User MA
4	SIKEP	Bag. Kepegawaian
5	Aplikasi PTSP	Server local
6	Aplikasi DMS	Server local
7	Aplikasi DSS	Server local

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif Peradilan melalui berbagai Kebijakan pembaruan untuk mewujudkan Pengadilan yang Agung (Court of Excellence). Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Siru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Cetak Siru ini merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan Badan Peradilan secara utuh. Penyusunan Cetak Biru ini dengan menggunakan pendekatan kerangka Pengadilan yang unggul (The Framework of Courts Excellence). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) Area "Peradilan yang Agung" yang dibagi ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu: Pengarah/Pengendali (Driver), Sistem dan Penggerak (System and Enabler), dan Hasil (Result).

1. Sebagai Fungsi Pengarah adalah Area: **KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PENGADILAN**
2. Fungsi Sistem dan Penggerak, berada dalam Area:
 - 2.1. **KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PENGADILAN;**
 - 2.2. **SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA-PRASARANA DAN KEUANGAN;**
 - 2.3. **PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN;**
3. Sedangkan Fungsi hasil dalam Area:
 - 3.1. **KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN;**
 - 3.2. **PELAYANAN PENGADILAN YANG TERJANGKAU;**
 - 3.3. **KEPERCAYAAN DAN KEYAKINAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN;**

Tujuh Area ini dikembangkan berdasarkan kerangka Pengadilan yang Agung (Court Excellence Framework) yang merupakan Kerangka Pikir dan Kerja Bagi Pengadilan yang ingin meningkatkan Kinerjanya. Kerangka ini telah dikembangkan dan digunakan secara Internasional.

Dalam pelaksanaan Fungsi Teknis, Masalah yang dihadapi Badan-Badan Peradilan yang harus mendapat perhatian khusus, adalah:

1. Kepastian Hukum dan Kualitas serta konsistensi Putusan.
2. Lamanya proses berperkara. Hal ini berkaitan dengan pengeluaran biaya yang diperlukan di Pengadilan menjadi sulit untuk diprediksi.
3. Kurangnya pemahaman Pencari Keadilan dan Pengguna Pengadilan mengenai Prosedur, Dokumen dan Persyaratan yang diperlukan.
4. Minimnya kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.

Sedangkan permasalahan dalam Fungsi Pendukung, antara lain:

1. Dalam hal pengelolaan Sumber Daya Manusia, Distribusi Hakim dan Aparatur Peradilan yang belum merata.
2. Dalam hal pengelolaan Sumber Daya Keuangan, antara lain adalah belum adanya Standar Pelayanan yang baku terkait dengan penerimaan dan belanja negara, dan adanya perangkapan Jabatan antara Jabatan Struktural dengan Jabatan Pengelola Keuangan.
3. Dalam hal pengelolaan Sarana dan Prasarana, antara lain:
 - 3.1. Lokasi Pengadilan yang cukup sulit untuk diakses oleh Masyarakat yang berasal dari daerah pinggir Kota.
 - 3.2. Gedung Pengadilan yang masih perlu ditingkatkan kelayakannya dari sisi Keamanan maupun Kenyamanan.
 - 3.3. Kemampuan untuk mengelola Prasarana dan Sarana Pengadilan belum memadai sehingga berpengaruh terhadap Prestasi Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan Pengadilan.
 - 3.4. Akuntabilitas pengadaan Barang dan Jasa, serta Manajemen Aset Negara, yang perlu terus diupayakan perbaikannya.
 - 3.5. Penyimpanan dan pengelolaan informasi tentang aset negara yang belum dibuat secara baik.
 - 3.6. Dalam hal pengelolaan Teknologi Informasi (TI)
 - 3.6.1. Upaya untuk mengaplikasikan Teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para Pencari Keadilan dan pengguna Pengadilan, dimana perlunya 1 (satu) Kebijakan Sistem Pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan Fungsi di setiap unit kerja. Dengan

demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan Kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

3.6.2. Transparansi Peradilan hingga kini masih menjadi permasalahan yang sangat perlu diperhatikan dan dibenahi. Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari Pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pejabat Peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi Publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga Pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan Informasi.

Upaya penjaminan mutu Pengadilan Negeri Cikarang dilakukan dengan memperkuat sistem manajemen mutu yang mengacu pada sistem yang dikembangkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum, didukung dengan perubahan fisik maupun non-fisik serta ditunjang dokumen dalam penegasan penjaminan mutu meliputi manual mutu, SOP, SK-SK KPN, dokumen SAKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan dokumen pendukung lainnya.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

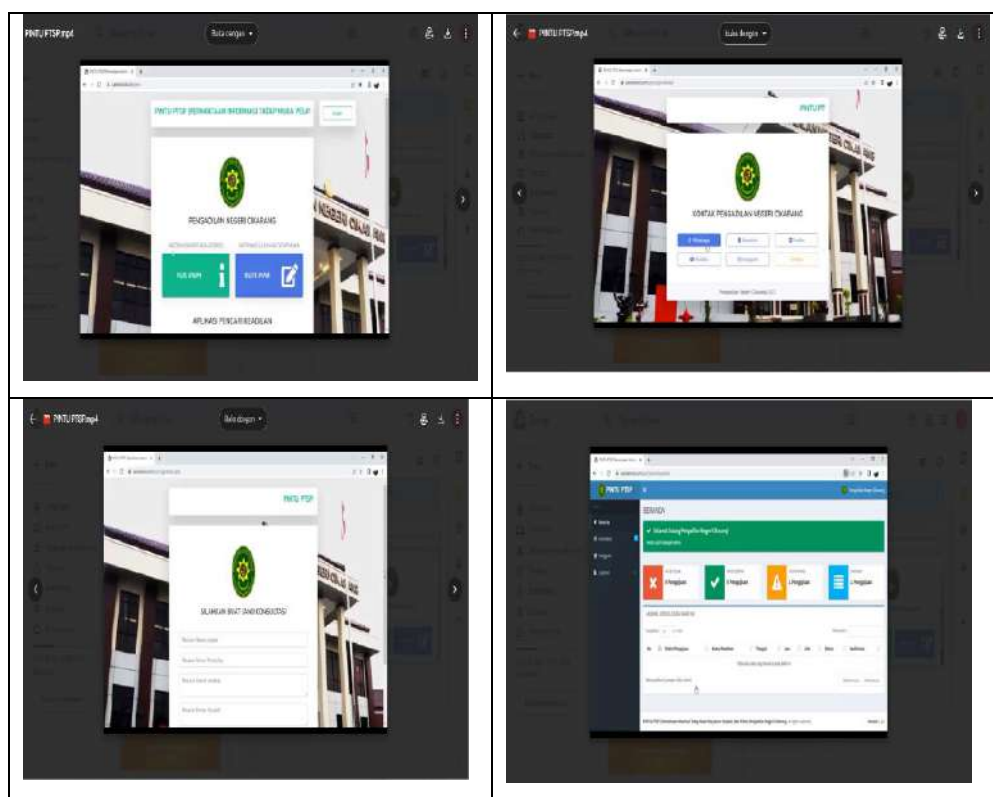
Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan, berkewajiban untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Bahwa selain itu, untuk lebih meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat dan untuk mengurangi interaksi langsung antara pencari keadilan dengan aparat pengadilan agar menghindari munculnya KKN, di mana secara ideal sebuah badan peradilan haruslah berorientasi pada pelayanan publik yang prima sebagai salah satu penjabaran visi badan peradilan yakni terwujudnya badan peradilan yang agung, dan sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan Zona Integritas pada area peningkatan pelayanan publik, maka tercetus ide untuk menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*). Sesuai pemikiran dari YM Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. pada pengukuhan beliau sebagai guru besar di UNAIR, bahwa tuntutan publik selalu menghendaki hasil yang cepat, dengan standar kepuasan yang cenderung terus menerus meningkat dari waktu ke waktu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate*

Integrated Service) yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu solusi, yang meliputi semua urusan administrasi baik bidang teknis maupun nonteknis. Sehingga dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*), diharapkan masyarakat pencari keadilan akan mendapatkan pelayanan peradilan yang prima. Dengan sistem tersebut diharapkan pula pelayanan yang diberikan menjadi terstruktur dan terukur (*direct service*) dan akan meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

1. APILKASI PINTU PTSP PENGADILAN NEGERI CIKARANG (PERMINTAAN INFORMASI TATAP MUKA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)



Inovasi Pintu PTSP berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang meminta informasi dari petugas PTSP Pengadilan Negeri Cikarang, tidak perlu datang ke kantor Pengadilan Negeri Cikarang, melainkan dapat mengajukannya melalui aplikasi tersebut. Aplikasi Pintu PTSP diberlakukan dengan tujuan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mengajukan permintaan informasi ke Pengadilan Negeri Cikarang. Aplikasi ini juga dimaksudkan untuk lebih mendekatkan Pengadilan Negeri Cikarang kepada masyarakat melalui pelayanan petugas PTSP secara virtual namun tetap *friendly*, sehingga diharapkan

akan dapat meningkatkan citra baik Pengadilan Negeri Cikarang di mata masyarakat.

2. PENEMPATAN CCTV BUILT IN MICROPHONE PADA 8 TITIK



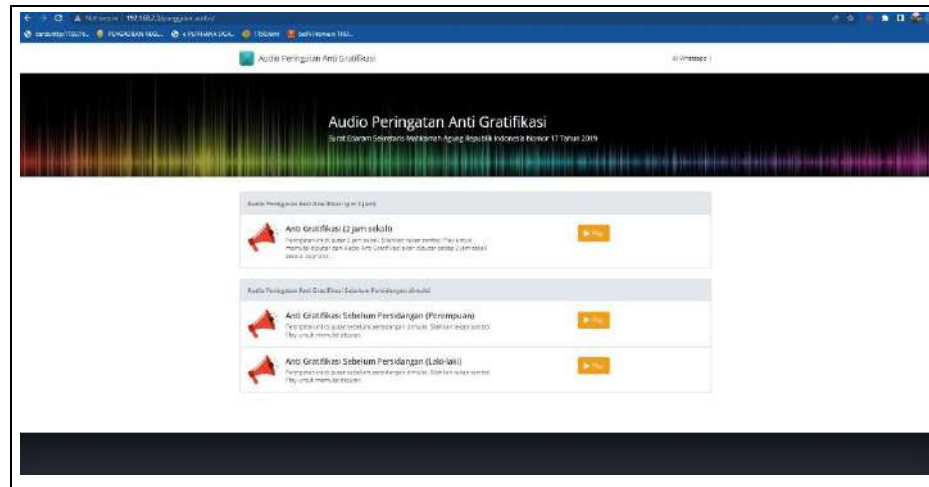
CCTV Built In Microphone ditempatkan di meja petugas PTSP, Ruang Tamu Terbuka dan meja Petugas Jaga Sidang, berfungsi untuk memudahkan Pimpinan, Panitera, Sekretaris, maupun Para Panmud dan Kasub selaku atasan langsung dari para petugas tersebut dalam melakukan monitoring atas pelaksanaan tugas pelayanan yang dilakukan. Inovasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan petugas PTSP maupun Petugas jaga sidang dan meminimalisir bahkan menghindarkan penyimpangan oleh petugas tersebut agar para petugas tersebut juga terjaga integritasnya.

3. PEMISAHAN AREA PARKIR INTERNAL DENGAN AREA PARKIR PENGUNJUNG PENGADILAN DILENGKAPI DENGAN BARRIER GATE DAN ACCES CARD



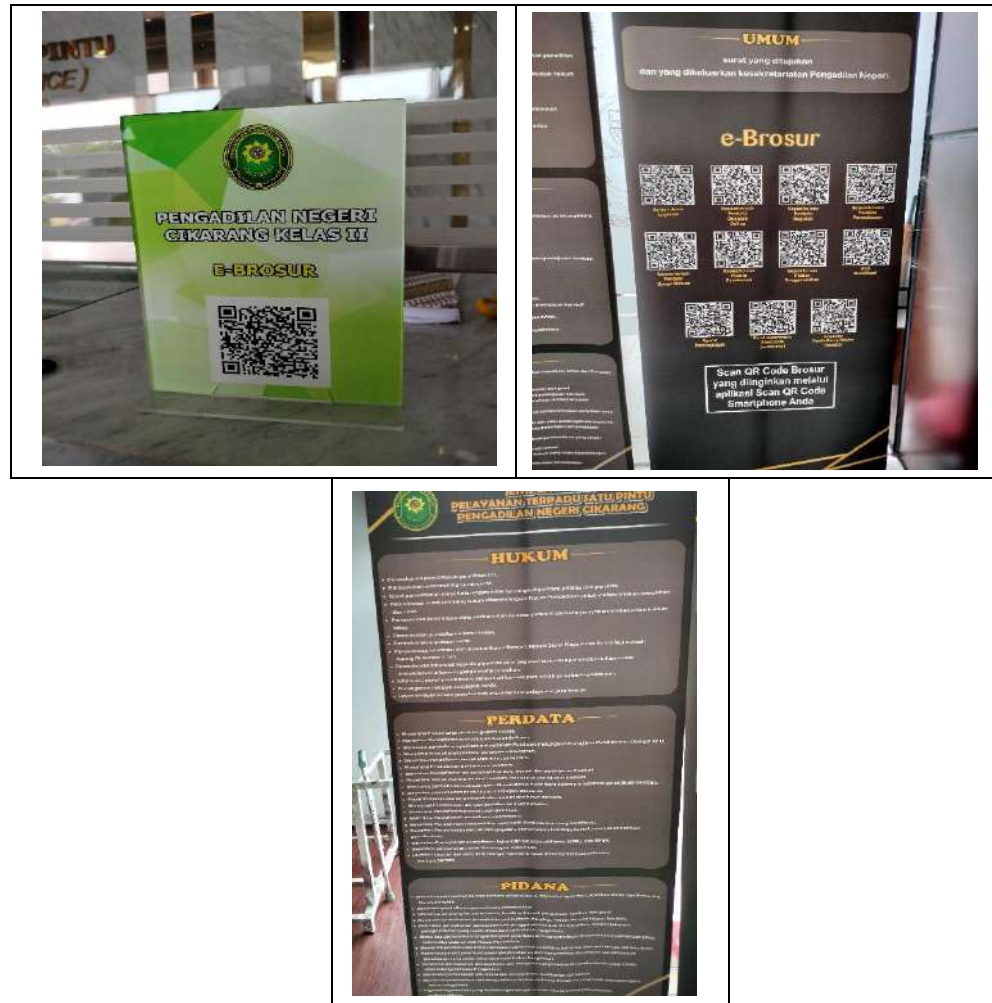
Pemisahan lahan parkir internal dengan pengunjung berfungsi untuk meminimalisir interaksi antara aparatur Pengadilan Negeri Cikarang dengan para pengunjung. Inovasi ini bertujuan menghindarkan penyimpangan oleh petugas tersebut agar para petugas tersebut juga terjaga integritasnya.

4. PEMUTARAN AUDIO ANTI GRATIFIKASI SETIAP 2 JAM SEKALI SECARA OTOMATIS



Pemutaran audio anti gratifikasi secara otomatis setiap 2 (dua) jam sekali berfungsi untuk mensosialisasikan kepada para pengunjung tentang Pengadilan Negeri Cikarang yang telah menerapkan kebijakan anti gratifikasi dalam setiap pelayanannya sehingga kepada pengunjung dihimbau untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun. Selain itu, dengan pemutaran audio anti gratifikasi tersebut secara berkali-kali diharapkan dapat mengingatkan kepada seluruh aparatur Pengadilan Negeri Cikarang untuk senantiasa menghindari penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun. Inovasi ini diberlakukan dengan tujuan sebagai pengingat kepada setiap apatur Pengadilan Negeri Cikarang agar senantiasa menjaga integritasnya dalam melaksanakan tugasnya.

5. E_BARCODE JENIS-JENIS LAYANAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG



Pembuatan e_Barcode layanan tersebut berfungsi untuk memudahkan pengunjung maupun masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai jenis-jenis layanan di Pengadilan Negeri Cikarang berikut persyaratannya. Inovasi ini diberlakukan dengan tujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas mengenai jenis-jenis layanan di Pengadilan Negeri Cikarang berikut persyaratannya, selain itu juga dengan ditayangkannya e_Barcode layanan di website resmi Pengadilan Negeri Cikarang bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang jenis layanan yang dibutuhkan dari handphone masing-masing.

6. RUANG SIDANG INKLUSIF YANG DILENGKAPI DENGAN LAYAR MONITOR



Ruang sidang inklusif yang dilengkapi layar monitor dibuat di Pengadilan Negeri Cikarang dengan fungsi untuk memudahkan Majelis Hakim maupun para pihak yang merupakan penyandang disabilitas dan kaum rentan dalam melaksanakan proses persidangan agar persidangan dapat berjalan lancar. Inovasi ini diberlakukan dengan tujuan untuk mengakomodir kepentingan kaum rentan dan penyandang disabilitas dalam melaksanakan persidangan. Selain itu inovasi ini juga dibuat dengan tujuan memudahkan proses persidangan agar berjalan lancar.

7. MESIN ANTRIAN PELAYANAN PTSP



Antrian PTSP Pengadilan Negeri Cikarang adalah aplikasi antrian buat para pencari keadilan yang berkepentingan terkait dengan bagian meja hukum,perdata,pidana dan umum. Dengan adanya aplikasi antrian PTSP ini bisa mempermudah para pencari keadilan untuk mengantri sesuai nomor antrian tersebut.

Fitur Antrian PTSP

- Pengambilan nomor antrian
- Meja petugas PTSP
- Layar LCD/TV

8. POJOK EKSEKUSI

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam proses pengajuan eksekusi, didalamnya terdapat proses anmaning, ketua pengadilan memberikan peringatan kepada termohon untuk melaksanakan putusan. Pada proses anmaning para pihak juga akan berusaha di damaikan, agar terjadi pelaksanaan putusan secara sukarela. Dengan melihat proses tersebut, maka diperlukan ruangan khusus yg nyaman, untuk itu Pengadilan Negeri Cikarang membuat inovasi pojok eksekusi berupa sebuah ruangan yang berfungsi sebagai ruang tamu terbuka sekaligus untuk melayani para pihak dalam perkara eksekusi. Ruangan tersebut dibatasi dengan kaca sehingga masih bersifat terbuka namun terbatas dikarenakan masih dapat terlihat dari luar. Ruangan tersebut dilengkapi dengan cctv built in microphone yg dapat merekam gambar dan suara.



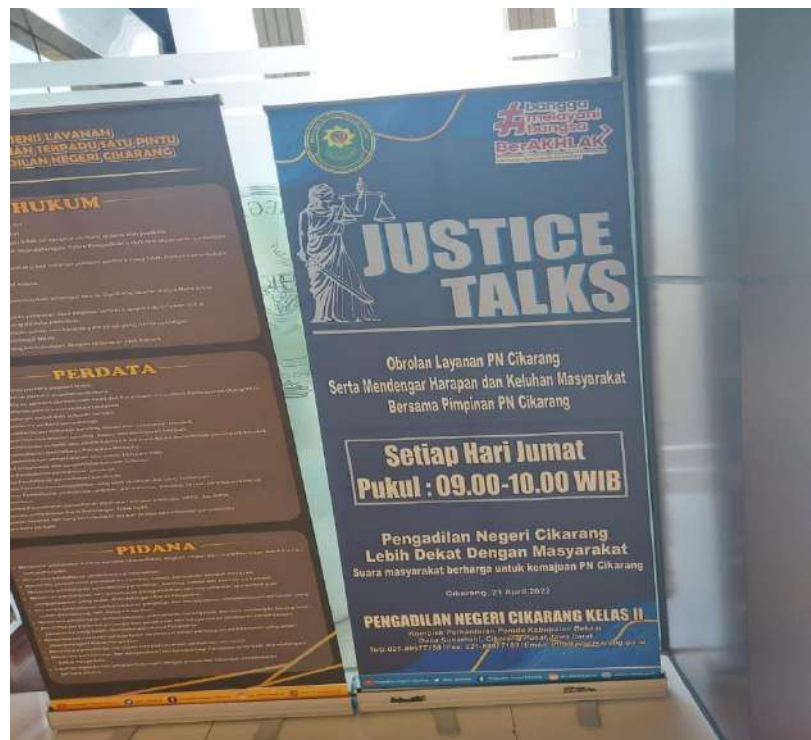
9. INOVASI POSBAKUM BERJALAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Cikarang telah terdapat Posbakum yang sehari-hari melayani masyarakat sesuai dengan jam layanan yang telah ditentukan, dimana setiap harinya terdapat petugas Posbakum Pengadilan Negeri Cikarang yang berjaga secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditentukan.



10. JUSTICE TALKS

Justice Talks merupakan inovasi Pengadilan Negeri Cikarang yang menyediakan tempat bagi masyarakat untuk memberikan masukan, saran, kritik maupun testimoni untuk kemajuan Pengadilan Negeri Cikarang. Dalam inovasi ini masyarakat pengguna layanan yang akan menyampaikan masukan - masukan kepada Pengadilan Negeri Cikarang dilayani oleh aparaturnya Pengadilan Negeri Cikarang dengan cara melakukan wawancara dengan tatap muka secara langsung di area Pengadilan Negeri Cikarang.



11. CO-WORKING SPACE

Co Working Space merupakan tempat yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Cikarang dengan menyediakan suatu *space* di area Ruang Tunggu Sidang sebagai tempat untuk bekerja. Dengan adanya penyediaan tempat tersebut maka para pihak yang menunggu persidangan dapat memanfaatkan waktunya secara efektif sambil mengerjakan sesuatu. Pada area tersebut disediakan *printer* untuk public



12. .POJOK BACA

Pojok Baca merupakan tempat yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Cikarang dengan menyediakan suatu *space* di area Ruang Tunggu Sidang yang memungkinkan pengunjung dapat menunggu persidangan sambil membaca sesuatu. Pada area ini dikhususkan untuk publik yang memungkinkan pengunjung dapat membaca buku - buku dan majalah hukum yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengisi waktu luang sekaligus menambah pengetahuan



13. POJOK MEDIA

Pojok Media merupakan tempat yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Cikarang untuk melayani tamu - tamu berupa awak media yang datang berkunjung untuk melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Cikarang. Wawancara tersebut bisa dilakukan dengan pimpinan atau humas serta aparatur Pengadilan Negeri Cikarang lainnya yang ditunjuk oleh pimpinan.



BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang diperuntukan untuk itu, dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pada tahun anggaran 2023, di Pengadilan Negeri Cikarang telah dilaksanakan pengawasan Internal dalam Bentuk Pengawasan Fungsional sekaligus melekat, yaitu dengan pengawasan yang bersifat rutin/reguler baik dari Pengadilan Tinggi Bandung maupun Pengawasan dari Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Cikarang sendiri maupun audit keuangan oleh BPKRI. Dalam hal Pengawasan, Pengadilan Negeri Cikarang berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Di Pengadilan Negeri Cikarang pelaksanaan pengawasan melekat telah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang dan Panitera/Sekretaris. Untuk Hakim-Hakim pelaksanaan pengawasan melekat ada pada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sedangkan pada pejabat Kepaniteraan, pejabat struktural maupun tenaga fungsional lainnya dilakukan oleh Panitera/Sekretaris. Untuk staf dilakukan oleh masing-masing pejabat kepaniteraan maupun pejabat strukturalnya.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN.

Pengawasan internal yang bersifat reguler/rutin pada Pengadilan Negeri Cikarang di lakukan dengan maksud untuk :

- Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan ;
- Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan ;

- mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan ketidakefisiensian penyelenggaraan peradilan ;
- Menilai kinerja aparat peradilan ;
- Identifikasi dan inventarisasi kendala dan permasalahan sehingga memudahkan evaluasi dan pemecahan masalah (solusi) .

2. BENTUK DAN METODE PENGAWASAN.

Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Negeri Cikarang dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang kepaniteraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut:

- Memeriksa program kerja;
- Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan/pelaksanaan program kerja ;
- Memberikan saran-saran untuk perbaikan ;
- Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Cikarang ;
- Merekomendasikan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut ;

3. PELAKSANAAN PENGAWASAN.

Pengawasan rutin / regular bertujuan untuk mengetahui rencana-rencana kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dan mengevaluasi sejauh mana program kerja Pengadilan Negeri Cikarang dapat dilaksanakan serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja.

Pengawasan rutin/regular pada Pengadilan Negeri Cikarang adalah dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

1. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup :
 - Administrasi perkara ;
 - Administrasi persidangan ;
2. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup :
 - Administrasi kepegawaian ;
 - Administrasi keuangan ;
 - Administrasi umum dan inventaris ;
3. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik .
4. Kedisiplinan waktu

Jam kerja Pengadilan adalah seperti berikut :

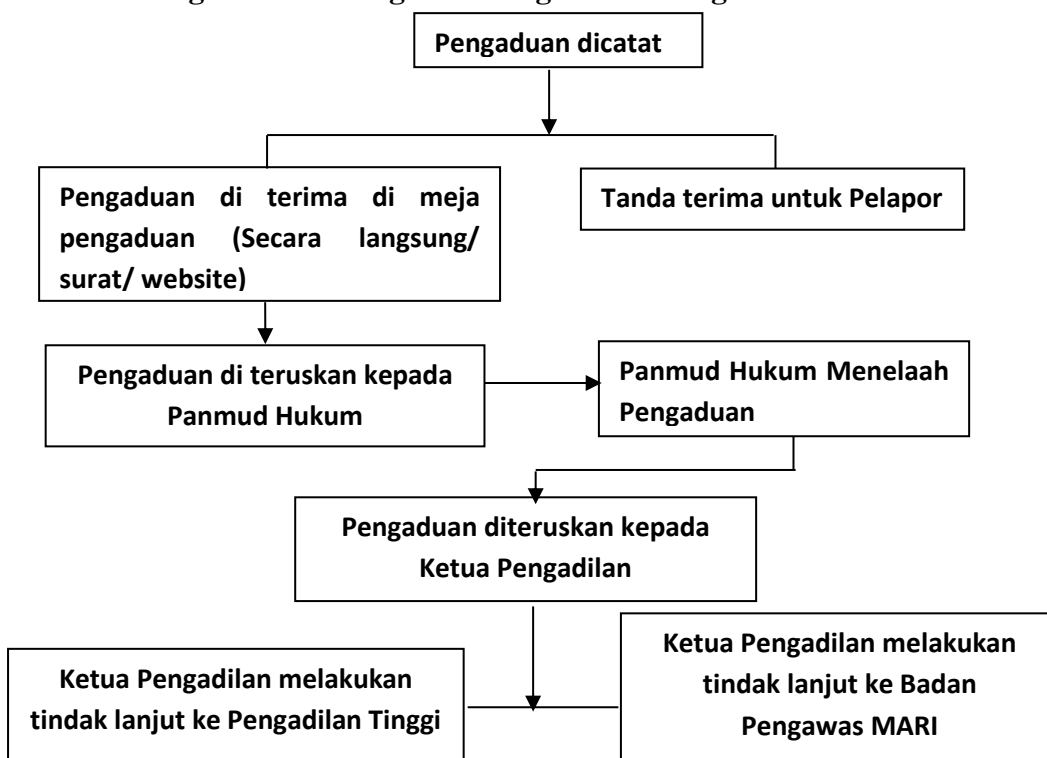
B.	Senin – Kamis	08.00 – 16.30 Istirahat 12.00 – 13.00
	Jumat	07.30 – 16.30 Istirahat 11.30 – 13.00

EVALUASI

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Cikarang baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang atau para pejabat yang berkopoten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

Alur penerimaan Pengaduan Di Pengadilan Negeri Cikarang



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 yang kami susun ini kami simpulkan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja kami dalam pengelolaan Pengadilan Negeri Cikarang, diantaranya ialah :

- a) Kebijakan umum yang kami lakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat dan pengelolaan sistem yang berjalan telah kami lakukan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari instansi yang ada di atas kami dengan menyesuaikan kondisi yang ada pada Pengadilan Negeri Cikarang walaupun dalam realisasinya belum optimal.
- b) Struktur Organisasi dan pembagian kewenangan telah kami sesuaikan dengan SOP dan telah dijalankan dengan baik oleh segenap unsur pada Pengadilan Negeri Cikarang
- c) Manajemen dan pengelolaan perkara pada Pengadilan Negeri Cikarang pada tahun 2023 ini banyak menyisakan pekerjaan rumah bagi kami di tahun 2024 nanti.
- d) Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Cikarang telah dijalankan dengan baik dan terus menerus dikembangkan agar lebih efektif dan obyektif.
- e) Pengelolaan dan peningkatan kualitas SDM Pengadilan Negeri Cikarang pada tahun 2023 ini telah kami lakukan dengan sebaik-baiknya.
- f) Pengelolaan Aset pada Pengadilan Negeri Cikarang telah dijalankan sesuai aturan dan mekanisme yang ada dan telah berjalan dengan cukup baik.
- g) Pengelolaan Keuangan Pengadilan Negeri Cikarang telah dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, akan tetapi kami kurang maksimal dalam hal penyerapan anggaran.
- h) Pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum Pengadilan Negeri Cikarang telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Rekomendasi

- a) Diperlukan sosialisasi yang lebih aktif dari Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi mengenai Blue Print Pembaruan Pengadilan 2010-2035.
- b) Perlu disegerakannya informasi terintegrasi antara pengadilan tingkat pertama, banding maupun MA.


- c) Penguatan fungsi litbang dan diklat mengingat masih lemahnya SDM pengelola keuangan, asset maupun perencanaan kinerja.
- d) Penguatan pengawasan melalui penempatan inspektorat yang berkompeten dari MA yang sifatnya tidak terikat dengan Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding dan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan.
- e) Pekerjaan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi atau komputer kadang bertumpu pada satu orang mohon diadakan pelatihan untuk menambah pengetahuan dan kemampuan missal untuk aplikasi komdanas, LPSE, SIMPEG, direktori putusan dan lain-lain.

Melalui laporan pelaksanaan kegiatan tahun ini kami mengusulkan bahwa kekurangan-kekurangan yang kami hadapi mohon segera dipenuhi atau ditindak lanjuti sehingga pekerjaan di kantor Pengadilan Negeri Cikarang dapat berjalan lancar dan tidak ada hambatan.

CIKARANG, 29 Desember 2023
PENGADILAN NEGERI CIKARANG

 KETUA

HENDRI AGUSTIAN, S.H, M.Hum.
NIP. 19750801 200502 1 001

SEKRETARIS

AGUNG NUGROHO, ST
NIP. 19830422 201101 1 013